

RENJA PERUBAHAN BKPSDM

**RENCANA KERJA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
MAHAKAM ULU**



TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Lembar Cover.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Rensra SKPD	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	25
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	27
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	29
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
4.1. Program dan Kegiatan.....	31
4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM	34
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023.....	12
Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	25
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Belanja SKPD Tahun 2023.....	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengemukakan bahwa Renja Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023 dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023;

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

1. Tahap Perumusan Rancangan Renja SKPD;

Perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan SKPD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;
10. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;
11. Pembahasan forum SKPD; dan
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

2. Tahap Penyajian Rancangan Renja SKPD;

Tahap Penyajian rancangan Renja SKPD merupakan sistematis penyajian Rancangan Renja yang disiapkan dan ditetapkan untuk menguraikan perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat beserta pagu indikatifnya. Proses penyusunan Renja SKPD pada tingkatan SKPD secara garis besar meliputi :

- (1) SKPD menyusun Renja-SKPD;
- (2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat;
- (3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju;
- (5) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antarpemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

seperti halnya RKP maka RKPD juga harus melalui proses MUSRENBANGDA. RPJMD dijabarkan kedalam RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan seterusnya diturunkan ke RENJA SKPD.

Dengan telah tersusunnya RPJMD, maka seluruh SKPD harus menyusun RENSTRA SKPD dengan berpedoman pada RPJMD tersebut dan selanjutnya disusun RENJA SKPD yang merupakan pelaksanaan dari RENSTRA SKPD untuk diteruskan dalam rangkaian proses seterusnya sampai dengan penyusunan RKA untuk ditetapkan menjadi DPA-SKPD. Dalam proses yang sama Pemerintah Daerah menyusun RKPD.

Proses penyusunan Rencana Kerja ini telah melalui proses pembahasan di internal SKPD maupun eksternal yang melibatkan instansi terkait yang dalam hal ini Bappeda Kabupaten Mahakam Ulu dan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang kemudian ditindaklanjuti dan dituangkan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2023.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rancangan pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, penyajian renja perangkat daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja SKPD disusun dengan maksud dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan terjaminnya konsistensi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah atau dokumen yang dipersamakan dengan itu.

1.3.2 Tujuan

Tersusunnya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Semester dua tahun 2023 dengan tetap menjaga konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya serta dengan dokumen anggarannya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023, meliputi :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta sistematika penulisan;

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap rancangan awal SKPD serta Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat;

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan; memuat Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, serta merumuskan Program dan Kegiatan yang didalamnya dirumuskan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi Kegiatan, target kinerja, Kebutuhan Dana Indikatif dan Sumber Dana dari Program dan Kegiatan SKPD yang dituangkan dalam tabel rekapitulasi program dan kegiatan;

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran yang memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD SMESTER 1 TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Turunan Renja SKPD Tahun 2023 semester satu yang terealisasi dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), capaian Program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Untuk Belanja Operasi Tahun 2023 semester satu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 15.673.096.263,-

b. Belanja Modal

Belanja Modal untuk Tahun 2023 semester satu terdiri atas Belanja Modal
Rp. 27.500.000,-
(Lihat Tabel 2.1)

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Belanja Operasi dan Belanja Modal SKPD Tahun 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kabupaten Mahakam Ulu

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5 03	KEPEGAWAIAN					
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	6,787,900	APBD
5 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA - SKPD	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10,390,500	APBD
5 03 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	9,779,800	APBD
5 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	#N/A	6,083,200	APBD
5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang/Bulan	4,659,355,463	APBD
5 03 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	283,440,000	APBD
5 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	7,482,000	APBD
5 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	9,953,200	APBD
5 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
5 03 01 2.05 03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Golongan I,II,III JFT/JFU, SK Peninjauan Masa Kerja, SK Pencantuman Gelar, SK KGB	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350 SK	41,468,000	APBD
5 03 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kegiatan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	62,267,000	APBD
5 03 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	131,086,700	APBD
5 03 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Sertifikat Peserta Sosialisasi dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Laporan dan 300 Dokumen	67,274,600	APBD
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Perawatan Instalasi Listrik dan AC	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Perawatan	4,997,200	APBD
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	#N/A	22,000,000	APBD
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pembelian ATK	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 paket	70,095,000	APBD
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Persediaan barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Map	22,000,400	APBD
5 03 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Persediaan Minuman Untuk Tamu	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	55 Dus	20,000,000	APBD
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi ke KORPRI Pusat Jumlah Pelaksanaan Dinas Dalam Daerah Jumlah Pelaksanaan Dinas Luar Daerah Jumlah Pelaksanaan Rapat KORPRI	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kali 8 Kali 4 Kali 4 Rapat	132,510,000	APBD
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
5 03 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembelian Bahan dan Peralatan Kebersihan kantor	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Buah	13,040,000	APBD
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	650 Lembar	7,500,000	APBD
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	#N/A	203,700,000	APBD
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Orang	1,671,800,000	APBD
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
					65,660,000	APBD

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Belanja Operasi dan Belanja Modal SKPD Tahun 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kabupaten Mahakam Ulu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Dinas Jumlah Pembelian BBM Kendaraan Dinas Jumlah Perawatan Kendaraan Dinas	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Buah 10000 Liter 6 Kali	50,590,000	APBD
5 03 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	15,070,000	APBD
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				7,421,841,800	APBD
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1,576,525,600	APBD
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Kebutuhan Pegawai ASN Kab. Mahakam Ulu, Jumlah Kebutuhan Pegawai Daerah Non ASN	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	23,782,000	APBD
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Formasi ASN yang Terisi	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Formasi	1,000,000,000	APBD
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Karis/Karsu, Jumlah Karpeg, dan Jumlah SK Pensiun	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180 Berkas 200 Berkas 45 SK	90,678,200	APBD
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kegiatan Lembaga Profesi ASN	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	191,793,000	APBD
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten Mahakam Ulu	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	270,148,200	APBD
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Data kepegawaian	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	104,500	APBD
5 03 02 2.01 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kegiatan Evaluasi sistem informasi Kepegawaian	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	19,700	APBD
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN				1,962,543,600	APBD
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah PNS Mutasi	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 PNS	54,319,800	APBD
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Golongan IV/a dan IV/b	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175 SK	64,993,600	APBD
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah PNS Promosi	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125	1,843,230,200	APBD
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN				3,100,150,000	APBD
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Beasiswa Tugas Belajar	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 PNS	1,916,000,000	APBD
5 03 02 2.03 05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Terselenggaranya LATSAR CPNS Dan Terlaksananya Orientasi PPPK Jabatan Guru di Lingkungan Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	#N/A	999,990,800	APBD
5 03 02 2.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Golongan IV/c	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 SK	77,494,500	APBD
5 03 02 2.03 15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Pengurusan Jabatan Fungsional	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 SK	106,664,700	APBD
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				782,622,600	APBD
5 03 02 2.04 01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1 Dokumen	301,618,000	APBD
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	118,404,600	APBD
5 03 02 2.04 03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	122,978,000	APBD
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Dokumen Pengajuan ASN Berprestasi, Laporan Kegiatan, Jumlah Piagam dan Sertifikat Penghargaan bagi ASN berprestasi	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Dokumen, 1 Laporan, dan 6 Penghargaan	43,300,000	APBD
5 03 02 2.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Dokumen Sertifikat dan Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya bagi ASN	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Dokumen	60,052,000	APBD
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Dokumen Absensi, Laporan Kinerja Bulanan, Dokumen Verifikasi Pengajuan TPP, Laporan Pelaksanaan Sidak Kehadiran Pegawai, Laporan Pelaksanaan Monitoring Absensi dan Dokumen	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33 Dokumen, 33 Laporan, 33 Dokumen, 1 Laporan, 3 Laporan dan 5 Dokumen	50,000,000	APBD
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Dokumen Kasus ASN yang melakukan Pelanggaran disiplin, Dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Dokumen Surat Keputusan (SK) Hukuman Disiplin dan Laporan Pelaksanaan Penyerahan SK Hukuman	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	86,270,000	APBD
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				750,083,500	APBD
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				750,083,500	APBD
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				750,083,500	APBD
5 04 02 2.02 05	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Kegiatan kerjasama Antar Lembaga		0	84,400	APBD

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Belanja Operasi dan Belanja Modal SKPD Tahun 2023
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 Kabupaten Mahakam Ulu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Diklat bagi jabatan Fungsional, PKN Tk.II, PKA dan PKP	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	#N/A	749,999,100	APBD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu belum mempunyai indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Prima (SPM) maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengingat penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru dalam ketentuan masih mengacu RPJMD Kabupaten Induk.

Namun sampai dengan sampai saat ini belum ada kajian terhadap Standar Pelayanan Prima (SPM) yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu terkait indikator kinerja yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Pencapaian kinerja pelayanan SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai DPA sebagai berikut :

Tabel 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023 Januari - Juni		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Formasi seleksi Penerimaan CPNS	Orang	200	76	38%
2	Jumlah Pemrosesan Kenaikan Pangkat	Orang	200	177	85%
3	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat	Orang	200	200	100%

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu adalah SKPD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang berdomisili di Ibukota Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu.

Jumlah Sumber Daya Manusia pendukung tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu sebagai berikut :

1. Jumlah PNS yang menduduki Jabatan Struktural dan Non Struktural

:

Tahun 2022			Tahun 2023		
Eselon II.b	1	Orang	Eselon II.b	1	Orang
Eselon III.a	1	Orang	Eselon III.a	1	Orang
Eselon III.b	2	Orang	Eselon III.b	2	Orang
Eselon IV.a	8	Orang	Eselon IV.a	8	Orang
PNS Staf	9	Orang	PNS Staff	9	Orang
Jumlah	21	Orang	Jumlah	21	Orang

2. Jumlah Pegawai TNP Per 1 Januari 2023 :

S2, Tidak ada
 S1, 20 Orang
 D3, 1 Orang
 DI/SLTA, 12 Orang
 SLTP, Tidak ada
 SD, 1 Orang
 (Total 33 Orang)

Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang telah direncanakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA BKPSDM) Tahun 2023 berjalan cukup baik dengan realisasi kinerja keuangan mencapai 37,58 % hal ini dikarenakan Realisasi Tahun berjalan baru pada tahap smester 1 TA 2023.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi dan analisis kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2023, maka dapat disikapi beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas-tugas dibidang kepegawaian hal ini berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas berdasarkan hambatan-hambatan/permasalahan dan solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Masih banyak PNS yang perlu ditingkatkan kapasitas kompetensinya guna untuk tercapainya kinerja aparatur yang profesional dan kompeten;l
2. Sebagian besar PNS belum memahami pembuatan SKP SIAN;
3. Belum terciptanya sinkronisasi data yang baik antara pengelolaan data mutasi dan jumlah aktual PNS di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu;
4. Belum memiliki sistem untuk data pengurusan KARIS dan KARSU;
5. Belum memiliki sistem pendataan perubahan status pribadi PNS (Menikah, Cerai, Meninggal, melahirkan dan lain - lain);
6. Belum memiliki Pendataan secara sistem untuk data PNS yang sudah/belum mengikuti Diklat;
7. Tingkat kelulusan yang rendah dalam pelaksanaan Seleksi CPNS dan PPPK;
8. Masih adanya kasus Indislpiner PNS.

Dari beberapa hambatan/permasalahan diatas maka ditemukan solusi yang harus dicapai yaitu :

- a. Perlu diadakan sosialisasi mengenai PP 94 tahun 2021 untuk meningkatkan pemahaman mengenai penanganan masalah yang terkait dengan Disiplin dan sanksi Pegawai Negri Sipil (PNS);
- b. Perlu diadakan Sosialisasi mengenai Peraturan Kepegawaian (Evaluasi SKP, evaluasi kinerja pegawai, Pensiun, Mutasi Pegawai dan Alih Status);

- c. Perekrutan Pegawai melalui tes CPNS/PPPK sesuai dengan kebutuhan;
- d. Pegawai BKPP perlu mengikuti Diklat/Bimtek sesuai dengan Tupoksi;
- e. Perlu adanya Dukungan Publikasi Secara elektronik (website) untuk pelayanan informasi kepegawaian.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mahakam Ulu tidak dilaksanakan disebabkan dokumen dimaksud terbatas sebagai bahan kerja oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan tidak didistribusikan ke SKPD-SKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu serta isu-isu strategis yang dihadapi tersebut diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak sebagai kapasitas untuk mengakomodir Program dan Kegiatan Masyarakat untuk dimasukkan kedalam Rencana Kerja, akan tetapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai tugas dan fungsinya merupakan pengejawantahan kepentingan publik khususnya Pegawai Negeri Sipil karena tugas pokok fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah melaksanakan urusan kepegawaian di tingkat daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sejalan dengan arah kebijakan prioritas pembangunan nasional dan kebijakan provinsi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam RPJMD 2021-2026 pada Misi 4 : Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel. Sejalan dengan visi dan misi Bupati terpilih kabupaten Mahakam Ulu Tahun (2021-2026), maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Mahakam Ulu menyusun langkah - langkah kegiatan strategis guna tercapainya penataan atau penempatan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sesuai dengan Kompetensi dan Terlaksananya Pemerintahan yang baik sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Tahun (2021-2026) Langkah - langkah Kegiatan strategis antara lain meliputi :

1. Pendataan Pegawai Negeri Sipil Secara langsung dan menyeluruh pada seluruh SKPD di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu dan melaksanakan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
2. Peningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Diklat - Diklat;
3. Pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi / JPT (Assesment) yang mengacu pada sistem MERIT sesuai dengan :
 - a. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Permenpan No. 13 Tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah;
 - c. Perka BKN No. 37 Tahun 2011 tentang Pedoman penataan Pegawai Negeri Sipil.

4. Pemberian Reward/Penghargaan berupa Satya Lencana bagi Pegawai Negeri sipil yang memenuhi kriteria.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

a. Tujuan

Tujuan Renja SKPD disusun sebagai bahan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yakni :

1. Terwujudnya komposisi aparatur yang sesuai dengan beban kerja;
2. Terwujudnya tata kelola dan administrasi kepegawaian yang baik dan transparan;
3. Meningkatkan profesionalisme aparatur yang mengarah pada peningkatan produktivitas dan akuntabilitas.

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan yakni :

1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan pegawai;
2. Meningkatkan sumber daya aparatur yang berkualitas.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun Program dan kegiatan yang direncanakan pada Semester 2 Tahun 2023 terdiri dari 2(Dua) Unsur Penunjang urusan Pemerintahan, 3(tiga) Program ,11(Sebelas) Kegiatan, dan 49(empat Puluh Sembilan) Sub. Kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 21 Tahun 2011, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Kepegawaian Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan:

- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian;
- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
- Pengelolaan Data Kepegawaian;
- Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian.

2. Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan:

- Pengelolaan Mutasi ASN;
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
- Pengelolaan Promosi ASN.

3. Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan:

- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;
- Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat;
- Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional;
- Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional.

4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
- Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
- Pembinaan Disiplin ASN
- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- Pembinaan Disiplin ASN;
- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan:

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM Kab. Mahakam Ulu

Untuk mendukung program kerja yang menjadi skala prioritas dan penunjang tersebut diatas, diperlukan dana yang bersumber dari APBD-P Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 sebesar Rp. 19.490.041.063,- yang terdiri dari :

No.	Belanja	Anggaran
1	Belanja Pegawai	Rp. 4.960.230.663,-
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 14.222.810.400,-
3	Belanja Modal	Rp. 307.000.000,-
JUMLAH		Rp. 19.490.041.063,-

Sedangkan pagu indikatif Belanja Operasional dan Belanja Modal untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

(lihat tabel 3.1)

Tabel 3.1
Rumusan Perubahan Rencana Belanja SKPD Tahun 2023
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Mahakam Ulu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN 2023					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6		7	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5 03	KEPEGAWAIAN							
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	6,787,900	6,787,900	0	APBD
5 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA - SKPD	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10,390,500	10,390,500	0	APBD
5 03 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen dan 2 Kegiatan Koordinasi	202,067,800	9,779,800	192,288,000	APBD
5 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan 9 Koordinasi/Pelatihan/Bimtek	208,691,200	6,083,200	202,608,000	APBD
5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang/Bulan	4,659,355,463	4,659,355,463	0	APBD
5 03 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	283,440,000	283,440,000	0	APBD
5 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	7,482,000	7,482,000	0	APBD
5 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	9,953,200	9,953,200	0	APBD
5 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
5 03 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Golongan I,II,III JFT/JFU, SK Peninjauan Masa Kerja, SK Pencantuman Gelar, SK KGB	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350 SK	99,111,000	41,468,000	57,643,000	APBD
5 03 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kegiatan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	62,267,000	62,267,000	0	APBD
5 03 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	131,086,700	131,086,700	0	APBD
5 03 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Sertifikat Peserta Sosialisasi dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Laporan dan 300 Dokumen	227,270,000	67,274,600	159,995,400	APBD
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Perawatan Instalasi Listrik dan AC	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Perawatan	4,997,200	4,997,200	0	APBD
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Unit Laptop High dan 2 PC AIO	283,000,000	22,000,000	261,000,000	APBD
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pembelian ATK	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 paket	70,095,000	70,095,000	0	APBD
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Persediaan barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Map	22,000,400	22,000,400	0	APBD
5 03 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Persediaan Minuman Untuk Tamu	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	55 Dus	20,000,000	20,000,000	0	APBD
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi ke KORPRI Pusat Jumlah Pelaksanaan Dinas Dalam Daerah Jumlah Pelaksanaan Dinas Luar Daerah Jumlah Pelaksanaan Rapat KORPRI Jumlah Pelaksanaan SKPD	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kali 8 Kali 4 Kali 4 Rapat 4 Rapat	353,801,000	132,510,000	221,291,000	APBD
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
5 03 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembelian Bahan dan Peralatan Kebersihan kantor	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Buah	13,040,000	13,040,000	0	APBD
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Lembar	10,000,000	7,500,000	2,500,000	APBD
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan x 3 unit indhome dan 12 Bulan Lintas Maya	344,200,000	203,700,000	140,500,000	APBD
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Orang	1,671,800,000	1,671,800,000	0	APBD
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Dinas Jumlah Pembelian BBM Kendaraan Dinas	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Buah 10000 Liter 6 Kali	185,630,000	50,590,000	135,040,000	APBD
5 03 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	15,070,000	15,070,000	0	APBD
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Kebutuhan Pegawai ASN Kab. Mahakam Ulu, Jumlah Kebutuhan Pegawai Daerah Non ASN	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	23,782,000	23,782,000	0	APBD
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Formasi ASN yang Terisi	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Formasi	1,000,000,000	1,000,000,000	0	APBD
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Karis/Karsu, Jumlah Karpeg, dan Jumlah SK Pensun	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180 Berkas 200 Berkas 45 SK	90,678,200	90,678,200	0	APBD
5 03 02 2.01 08	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Kegiatan Lembaga Profesi ASN	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	541,792,300	191,793,000	349,999,300	APBD

Tabel 3.1
Rumusan Perubahan Rencana Belanja SKPD Tahun 2023
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Mahakam Ulu

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN 2023						
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6			7	
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten Mahakam Ulu	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	270,148,200	270,148,200	0	APBD	
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Data kepegawaian	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	104,500	104,500	0	APBD	
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kegiatan Evaluasi sistem informasi Kepegawaian	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	505,562,000	19,700	505,542,300	APBD	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN					2,594,365,100	1,962,543,600		APBD
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah PNS Mutasi	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 PNS	54,319,800	54,319,800	0	APBD	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Golongan IV/a dan IV/b	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175 SK	125,891,100	64,993,600	60,897,500	APBD	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah PNS Promosi	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125	2,414,154,200	1,843,230,200	570,924,000	APBD	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN					3,207,449,800	3,100,150,000		APBD
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Beasiswa Tugas Belajar	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 PNS	1,802,621,000	1,916,000,000	-113,379,000	APBD	
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Terselenggaranya LATSAR CPNS Dan Terlaksananya Orientasi PPPK Jabatan Guru di Lingkungan Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Peserta	1,170,484,100	999,990,800	170,493,300	APBD	
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Golongan IV/c	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 SK	127,680,000	77,494,500	50,185,500	APBD	
5	03	02	2.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Pengurusan Jabatan Fungsional	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 SK	106,664,700	106,664,700	0	APBD	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					1,321,328,100	782,622,600		APBD
5	03	02	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1 Dokumen	301,618,000	301,618,000	0	APBD	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	563,576,400	118,404,600	445,171,800	APBD	
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	122,978,000	122,978,000	0	APBD	
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Dokumen Pengajuan ASN Berprestasi, Laporan Kegiatan, Jumlah Piagam dan Sertifikat Penghargaan bagi ASN berprestasi	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Dokumen, 1 Laporan, dan 6 Penghargaan	43,300,000	43,300,000	0	APBD	
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Dokumen Sertifikat dan Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya bagi ASN	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Dokumen	60,052,000	60,052,000	0	APBD	
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Dokumen Absensi, Laporan Kinerja Bulanan, Dokumen Verifikasi Pengajian TPP, Laporan Pelaksanaan Sidelok Kehidupan	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33 Dokumen, 33 Laporan, 33 Dokumen, 1 Laporan, 3 Laporan dan 5 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0	APBD	
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Dokumen Kasus ASN yang melakukan Pelanggaran disiplin, Dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Dokumen Surat	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	179,803,700	86,270,000	93,533,700	APBD	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					750,083,500	750,083,500		APBD
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1,033,294,500	750,083,500		APBD
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					1,033,294,500	750,083,500		APBD
5	04	02	2.02	05	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Kegiatan kerjasama Antar Lembaga		0	84,400	84,400	0	APBD	
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Terselenggaranya Diklat bagi jabatan Fungsional, PKN Tk.II, PKA dan PKP	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Peserta	1,033,210,100	749,999,100	283,211,000	APBD	

**Rumusan Rencana Penambahan Pagu Belanja Perubahan SKPD Tahun 2023
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Rumusan evaluasi penambahan pagu pada APBD-P Badan kepegawaian dan pengembangan sumber Daya manusia meliputi 20 kegiatan antara lain;

1. Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat di perlukan penambahan pagu dari pagu awal Rp. 999.990.800 menjadi Rp.1.170.484.100,- karena Adanya penambahan CPNS PKN STAN di Kab. Mahakam Ulu, dan pengadaan kegiatan Latsar CPNS di adakan di LAN Jakarta sehingga membutuhkan penambahan pagu. Terdapat kekurangan pembayaran denda keterlambatan berdasarkan hasil perhitungan inspektorat Provinsi atas biaya kontribusi kegiatan latsar CPNS tahun 2021.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan di perlukan penambahan pagu dari pagu awal Rp. 789.027.000 menjadi Rp. 1.072.238.000 karena adanya Penambahan peserta Diklat PBJ sebanyak 10 peserta, Terdapat kekurangan pembayaran denda keterlambatan berdasarkan hasil perhitungan inspektorat Provinsi atas biaya kontribusi kegiatan PKP dan PKA tahun 2021.
3. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD di perlukan penambahan pagu dari pagu awal Rp. 9.779.800 menjadi Rp. 202.067.800 Karena Belum terakomodirnya pada pagu APBD murni TA 2023 kegiatan Koordinasi terkait SAKIP yang sudah dan yang akan dilaksanakan sampai dengan pelaporan Keuangan Akhir tahun.
4. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD di perlukan penambahan pagu dari pagu awal Rp. 6.083.200 menjadi Rp. 208.691.200 dikarenakan Belum terakomodir beberapa Kegiatan Koordinasi/Bimtek/Pelatihan Terkait Bidang Urusan Perencanaan Program Dan Pelaporan Keuangan pada pagu APBD murni TA 2023, yang sudah dilaksanakan terlebih dahulu.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber air dan Listrik di perlukan penambahan pagu dari pagu awal Rp. 78.833.334 menjadi Rp. 219.333.334 dikarenakan pagu sub kegiatan awal hanya bisa mengakomodir biaya kebutuhan listrik dan internet 9 bulan saja, sedangkan keperluan pembiayaan kebutuhan operasional internet dan listrik harus mencakup sampai dengan 12 bulan.
6. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan di perlukan penambahan pagu dari pagu awal Rp. 67.274.600 menjadi Rp. 227.270.000 dikarenakan akan ada beberapa kegiatan sosialisasi kedepannya yang perlu diakomodir.
7. Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin di perlukan penambahan pagu dari pagu awal Rp. 86.270.000 menjadi Rp. 179.803.700 dikarenakan pada pagu anggaran sebelumnya hanya mengakomodir Kasus pelanggaran disiplin sedangkan ada penambahan kasus pelanggaran disiplin yang harus diselesaikan.

8. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur di perlukan penambahan pagu dari pagu awal Rp. 118.404.600 menjadi Rp. 553.426.400,-dikarenakan pagu sub kegiatan awal hanya bisa mengakomodir biaya kegiatan pendampingan SKP Tahun 2022 dan belum untuk kegiatan pendampingan bimtek aplikasi E Kinerja juga bimtek penyusunan SKP pada aplikasi E Kinerja Tahun 2023.

9. Kegiatan Pengelolaan Promosi di perlukan penambahan pagu dari pagu awal Rp. 1.843.230.200 menjadi Rp. 2.514.154.200,- dikarenakan pagu sub kegiatan awal hanya bisa mengakomodir sebagian mobilitas kegiatan manajemen asn, sedangkan kegiatan manajemen asn terus berkembang dan dinamis, selain itu lowongnya jabatan pada beberapa jabatan pimpinan tinggi pratama di pemkab.

10. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dengan pagu Rp. 1.000.000.000 Perlu dilakukan sweep pada anggaran honorarium Tim Penilai PPPK Guru dikarenakan pengadaan PPPK Guru T.A 2023 ini tidak menggunakan tim penilai sekolah lagi, digantikan dengan tes Cosh-Sharing CAT, maka anggaran untuk honor Tim Penilai Sekolah akan di sweep ke anggaran perjalanan dinas, makan minum rapat dan sebagian ke Alat Tulis.

11. Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem informasi Kepegawaian di perlukan penambahan pagu dari pagu awal Rp. 19.700 menjadi Rp. 442.262.000,- untuk menunjang kegiatan sosialisasi dengan tema Program Transformasi Digitalisasi Layanan Managemen ASN yang mana mengundang narasumber dari BKN Pusat dan BKN Kantor Regional VIII Banjarmasin, pada pagu awal tidak dapat menunjang kegiatan tersebut sehingga perlu adanya penambahan untuk mengakomodir kegiatan.

12. Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian di perlukan penambahan pagu dari pagu awal Rp. 41.468.000 menjadi Rp. 99.111.000 untuk kepengurusan ke BKD Provinsi dikarenakan pagu kegiatan awal hanya bisa mengakomodir pada periode April.

13. Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN di perlukan penambahan pagu dari pagu awal Rp. 63.073.600 menjadi Rp. 123.971.100 untuk kepengurusan ke Kantor Regional Banjarmasin dikarenakan pagu kegiatan awal hanya bisa mengakomodir pada periode April.

14. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional di perlukan penambahan pagu dari pagu awal Rp. 77.494.500 menjadi Rp. 127.680.000 untuk kepengurusan ke BKN Pusat Jakarta dikarenakan pagu kegiatan awal hanya bisa mengakomodir pada periode April.

15. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di perlukan penambahan pagu

dari pagu awal Rp. 7.500.000 menjadi Rp. 10.000.000 dikarenakan masih belum terpenuhi kebutuhan pembelanjaan ATK (materai) untuk administrasi Surat Menyurat BKPSDM.

16. Kegiatan Penyediaan Peralatan Kantor di perlukan penambahan pagu dari pagu awal Rp. 22.000.000,- menjadi Rp. 283.000.000,- untuk mengakomodir kebutuhan belanja modal pengadaan Laptop dan PC dari kegiatan Sub kegiatan Promosi ASN, Sub Bagian Program perencanaan dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat sebanyak 9 unit Laptop High Performance dan 2 Unit PC AIO.
17. Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD di perlukan penambahan pagu dari pagu awal Rp. 132.510.000 menjadi Rp. 353.801.000,- dikarenakan belum ter akomodir beberapa kegiatan Koordinasi perjalanan dinas dalam dan Luar Daerah yang sudah terlebih dahulu dilaksanakan.
18. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di perlukan penambahan pagu dari pagu awal Rp. 50.590.000 menjadi Rp. 185.630.000 karena masih belum tercukupi kebutuhan operasional kendaraan dinas untuk Operasioanal BBM dan Biaya Perbaikan Kendaraan dinas sampai dengan triwulan IV.
19. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dilakukan pengurangan dari pagu awal Rp. 1.916.000.000 menjadi Rp. 1.802.621.000, dikarenakan pemberian beasiswa untuk dokter hanya diberikan 1 kali dalam satu Tahun.
20. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN di perlukan penambahan pagu dari pagu awal Rp. 191.793.000 menjadi Rp. 541.792.300 yang pada rincian sebelumnya hanya untuk kegiatan memperingati HUT KORPRI saja, Sedangkan penambahan ini untuk melaksanakan kegiatan Emotional Spiritual Quotient(ESQ) untuk Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Mahakam Ulu.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 merupakan dokumen yang secara substansial adalah penerjemahan dari tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan. Disamping itu, Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA) tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja SKPD) ini merupakan gambaran program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 smester dua untuk mendukung program pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Belanja	Anggaran
1	Belanja Pegawai	Rp. 4.960.230.663,-
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 14.222.810.400,-
3	Belanja Modal	Rp. 307.000.000,-
JUMLAH		Rp. 19.490.041.063,-

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mahakam Ulu ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan tugas di tahun 2023, sehingga kedepan diharapkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan menjadi optimal dengan ditunjang oleh pendanaan yang memadai. Atas perhatian dan dukungan semua pihak diucapkan terima kasih.

Ujoh Bilang, 13 Juli 2023 Kepala

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kab. Mahakam Ulu,

The image shows a blue circular official stamp of the Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Wenefrida Kayang, S.Sos, M.Si

NIP. 19650914 198811 2 001